



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT

PERUBAHAN

KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**NOMOR : 26 TAHUN 2023
NOMOR : 06 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2023**

T E N T A N G

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Prof.Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH,MH.**
Jabatan : Pj.Gubernur Sulawesi Barat.
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

Bertindak selaku dan atas nama **Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat**

2. a. N a m a : **Dr.Hj. SITTI SURAIDAH SUHARDI, SE, M.Si.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- b. N a m a : **USMAN SUHURIAH.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- c. N a m a : **H. ABDUL HALIM.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- d. N a m a : **H. ABDUL RAHIM, S.Ag, MH.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun

Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2023.


Ditetapkan di Mamuju, 25 September 2023.


GUBERNUR SULAWESI BARAT

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Dr. Hj. SITI SURAIDAH SUHARDI, SE, M.Si.
Ketua


USMAN SUHURIAH.
Wakil Ketua,


H. ABDUL HALIM.
Wakil Ketua,


H. ABDUL RAHIM, S.Ag, MH.
Wakil Ketua,

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	1
BAB II	
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
BAB III	
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	13
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	13
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	14
BAB IV	
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	15
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2022	15
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17
BAB V	
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	22
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	22
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	25
BAB VI	
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	28
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	28
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	28
BAB VII	
STRATEGI PENCAPAIAN	31
BAB VIII	
PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD (KUPA)

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat KUPA meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada Pasal 169 sampai dengan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi penerapannya.

Penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Barat, dijabarkan kedalam dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan KUPA

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat yang disusun bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat;
3. Sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat;

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang mendasari penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 (Lembaran

- Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 8);
 35. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
 36. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 16);
 37. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 49).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD disusun sebagai salah satu pedoman dalam rangka penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat yang memuat tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Perekonomian Sulawesi Barat diperkirakan tumbuh positif seiring dengan perkembangan tingkat inflasi yang terus menurun serta upaya pemulihan dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan bencana alam gempa bumi, serta mendorong sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat, serta persiapan menghadapi Pesta Demokrasi di Tahun 2024.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Di era ekonomi modern saat ini, telah terbukti secara empiris bahwa mekanisme pasar tidak dapat berjalan sendiri tanpa peran pemerintah untuk mencapai kondisi perekonomian yang optimal. Kondisi ini memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengambil peran yang lebih banyak dalam membuat kebijakan ekonomi agar manfaat dari perekonomian dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat. Pembangunan dilaksanakan mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan. Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu aspek penting untuk melihat kinerja pembangunan adalah penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan indikator penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu negara atau daerah.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam suatu daerah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan

PDRB atas dasar harga konstan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun.

Produk Domestik Regional Bruto dikenal dengan sebutan *Gross Regional Domestic Product* yang merupakan Salah satu konsep pendapatan. Salah satu komponen PDRB yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah realisasi belanja daerah Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten di Sulawesi Barat. Realisasi belanja Pemerintah daerah yang mengalami kenaikan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten di Sulawesi Barat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang akseleratif pada triwulan IV pada tahun berjalan. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten se-Sulbar pada triwulan IV tercatat sebesar Rp5,44 triliun, atau tumbuh 0,87% (yoy). Capaian positif ini utamanya didorong oleh peningkatan penggunaan komponen belanja operasi pada triwulan pelaporan.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Terdapat tiga komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*growth in population*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*).

Perekonomian Sulawesi Barat triwulan I tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,59 persen jika dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2022 (y-on-y). Peningkatan penciptaan nilai tambah terjadi pada 11 dari total 17 kategori lapangan usaha. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Secara kumulatif, perekonomian Sulawesi Barat pada tahun 2023 diproyeksikan mengalami akselerasi pertumbuhan. Kinerja ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2023 diperkirakan berada di kisaran 4,51%—5,31% (yoy).

2.1.3. Inflasi

Tingkat inflasi Sulawesi Barat tahun 2023 diperkirakan kembali ke rentang target $3\pm 1\%$ yang ditetapkan dan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Faktor yang memengaruhi penurunan prakiraan inflasi Sulawesi Barat pada tahun 2023 bersumber dari global maupun domestik. Dari sisi global, tren pengimplementasian

tightening monetary policy melalui kenaikan tingkat suku bunga oleh mayoritas bank sentral di berbagai negara secara langsung akan berdampak pada penahanan laju inflasi. Dari sisi domestik, risiko cuaca ekstrem El Nino juga diperkirakan memberikan dampak keterbatasan stok komoditas yang berimplikasi pada kenaikan harga, terutama pada harga komoditas pangan. Mobilitas yang lebih longgar pasca pencabutan kebijakan PPKM yang berpotensi meningkatkan konsumsi yang akan berimplikasi pada kenaikan harga. Selain itu, risiko bencana alam (banjir dan tanah longsor) yang memutus jalur perdagangan utama, yakni Jalan Trans Sulawesi akan memberikan dampak ketidaklancaran distribusi yang berpotensi menaikkan harga berbagai komoditas. Tantangan hasil perikanan yang banyak dipasarkan ke luar wilayah Sulawesi Barat akibat adanya disparitas harga antara Sulawesi Barat dengan provinsi lain turut akan memengaruhi persediaan stok komoditas aneka ikan segar. Prakiraan IHK tahunan Sulawesi Barat pada tahun berjalan berada pada rentang 2,79%-2,99%.

2.1.4. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang mana penduduk termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun – 65 tahun) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. TPT digunakan untuk menunjukkan kemampuan ekonomi dalam hal menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT mengartikan bahwa semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Sebaliknya semakin rendah TPT menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tenaga kerja yang termanfaatkan. Kondisi lapangan kerja diperkirakan akan membaik berdasarkan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan ke depan. Indeks ketersediaan lapangan kerja berada pada level 87 pada triwulan I 2023, meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2022 yang berada pada level 84, hal ini dapat menjelaskan bahwa ketersediaan lapangan kerja di Sulawesi Barat mengalami perbaikan seiring dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.

2.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial serius yang dihadapi oleh pemerintah. Meskipun telah berjuang puluhan tahun untuk membebaskan diri dari kemiskinan, kenyataan memperlihatkan bahwa sampai saat ini Indonesia belum

bisa melepaskan diri dari belenggu masalah kemiskinan begitu pula di Sulawesi Barat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Barat sebesar 11,92 persen atau meningkat 0,17 persen poin dibandingkan Maret 2022 dan meningkat 0,07 persen poin. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat pada bulan September 2022 sebanyak 169,26 ribu jiwa, mengalami peningkatan sebesar 3,54 ribu jiwa jika dibandingkan Maret 2022. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2022 sebesar 9,76 persen turun menjadi 9,33 persen pada September 2022. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami peningkatan dari sebesar 12,26 persen pada Maret 2022 menjadi 12,58 persen pada September 2022. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan yaitu perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dapat digambarkan bahwa kondisi kemiskinan menurun jika dibandingkan Maret 2022 yaitu sebesar 77,55 persen.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan pendapatan adalah salah satu aspek kemiskinan yang merupakan tolok ukur kemiskinan, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah. Ketimpangan pendapatan akan terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk di suatu daerah maka digunakan indeks gini rasio.

Indeks gini rasio (ketimpangan pendapatan penduduk) di mana Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang diukur oleh Gini Rasio tercatat sebesar 0,371 angka ini naik sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2021 yang sebesar 0,366, hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi penurunan perbaikan pemerataan pembangunan di provinsi Sulawesi Barat walaupun tidak signifikan.

2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan perluasan pilihan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan hak-

hak dasar lainnya. Pada konsep pembangunan manusia, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari kemajuan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mengakses sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan kualitas hidup manusia. IPM didasarkan pada tiga dimensi utama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. IPM memberikan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya manusia adalah Indeks pembangunan manusia.

Indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Sebagai gambaran capaian IPM Sulawesi Barat pada tahun 2017 adalah sebesar 64,30 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 66,36 atau naik sebesar 2,06. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat berada pada peringkat ke 31 dari 34 provinsi, meskipun demikian dari segi pertumbuhan IPM Sulawesi Barat berada pada peringkat kedua secara nasional, dengan pertumbuhan sebesar 0,58 persen sedangkan IPM Indonesia hanya tumbuh 0,03 persen. Salah satu faktor penyebab rendahnya IPM Sulawesi Barat adalah pada indikator angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah sedangkan untuk pengeluaran per kapita mengalami peningkatan yang cukup baik. Secara keseluruhan semua komponen pembentuk IPM Sulawesi Barat meningkat pada tahun 2021. IPM Sulawesi Barat masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai kategori level tinggi pada tahun 2022 sebesar 72,91. Kabupaten di Sulawesi Barat dengan tingkat IPM tertinggi berada di Kabupaten Mamuju sebesar 68,88 sebagai ibukota Provinsi, disusul kabupaten Pasangkayu sebesar 68,61 sedangkan IPM terendah berada di Kabupaten Polewali Mandar yang sebesar 64,79.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Tahun 2023 difokuskan dalam hal peningkatan kemandirian ekonomi daerah, peningkatan pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta perwujudan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa yang diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang terurai dalam proyeksi kapasitas riil keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah.

Kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan, untuk kemudian dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yakni: a) Prioritas Pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; b) Prioritas Kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan c) Prioritas Ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

2.1.1. Kebijakan Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2.1.2. Kebijakan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah

memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

2.1.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang perlu diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Rencana pembiayaan daerah memegang peranan penting untuk keberlangsungan pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perhitungan yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja.

Dalam kondisi APBD mengalami defisit, Pemerintah dapat mengambil kebijakan hutang (jangka pendek, menengah, atau panjang) untuk menutupi pembiayaan yang defisit. Sebaliknya, dalam kondisi APBD Surplus, Pemerintah dapat mengambil kebijakan penggunaan surplus anggaran sebagai dana cadangan, penyertaan modal, maupun pembayaran hutang yang jatuh tempo kepada pihak ketiga.

Kebijakan Pembiayaan diarahkan kepada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan probabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD Surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila Defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran merupakan rencana kerja yang disusun secara tertulis, kuantitatif, formal dan sistematis mengenai perkiraan kegiatan, penerimaan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam unit satuan moneter (uang) dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dalam menjalankan operasional sehari-hari.

Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan program kegiatan sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan dapat terkendali, yang tertuang dalam dokumen rencana kerja pegawai setiap SKPD. Anggaran tersebut menggambarkan pola kegiatan disetiap SKPD selama kurun waktu satu tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan.

Selanjutnya, melalui penyelarasan program prioritas daerah dan kebijakan program prioritas nasional, diharapkan pemerintah daerah secara bersama-sama dengan pemerintah pusat dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Konsumsi Pemerintah diproyeksikan meningkat dibanding tahun sebelumnya, juga diprediksi kembali mencatatkan pertumbuhan positif, didukung dengan perbaikan pola belanja operasional. Secara keseluruhan, tren pemulihan kinerja ekonomi diperkirakan kembali berlanjut di tahun 2023. Dengan kontribusi permintaan domestik yang cukup besar, pemulihan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut di 2023 di tengah tren perlambatan global.

Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural untuk menghilangkan berbagai hambatan pembangunan ekonomi mutlak harus terus dilakukan. Transformasi ekonomi yang dapat menciptakan struktur ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah tinggi, tidak bergantung pada satu sektor tertentu, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Faktor demografi hingga pertengahan tahun 2030-an menjadi modal penting untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan.

Capaian Pemerintah Pusat dalam Pencapaian
Indikator Kinerja Makro APBN
Tahun Anggaran 2023

Kinerja Indikator Makro Nasional	Target Pertumbuhan Tahun 2023	Capaian Pertumbuhan Tahun 2023
Pertumbuhan ekonomi	5,3-5,9 %	5,03 %
Tingkat pengangguran terbuka	6,0–5,3 %	5,45 %

Indeks Gini Ratio	0,378–0,375	0,388
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31–73,36	72,91
Angka kemiskinan	8,5-7,5 %	9,36 %

Sumber Data: Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 yang dirumuskan sebagai representasi dari fokus utama sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”** yang kemudian diterapkan kedalam 4 (empat) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah;
2. Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berbudaya;
3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Dalam proses pelaksanaan dan implementasi program kegiatan pada isu strategis Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 yang telah melalui hasil evaluasi, maka selanjutnya pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun Anggaran 2023 terfokus pada 5 (lima) isu strategis sebagai berikut:

1. Penanganan Kemiskinan
2. Penanganan Stunting;
3. Penanganan Anak Tidak Sekolah;
4. Penanganan Pernikahan Usia Anak;
5. Pengendalian Inflasi Daerah.

Capaian Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Indikator Kinerja Makro APBD Tahun Anggaran 2023

Kinerja Indikator Makro Daerah	Target RKPD Tahun 2023	Capaian Pertumbuhan Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
Pertumbuhan ekonomi	4,5–5,2 %	3,59 %	4,5–5,2 %
Tingkat pengangguran terbuka	2,98 %	3,04 %	2,98%
Indeks Gini Ratio	0,350–0,348	0,351	0,350–0,348
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,16–68,18	66,92	68,16–68,18
Angka kemiskinan	10,72 %	11,49 %	10,72 %

Sumber Data: Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023

Pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa–jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum
- 2) Retribusi jasa usaha
- 3) Retribusi perizinan tertentu

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan dari kerjasama penyelenggaraan diklat, pemakaian Barang Milik Daerah dan pendapatan usaha BLUD.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

- 1) dana perimbangan;
- 2) dana insentif daerah;

b. Transfer antar daerah

Transfer antar daerah berupa bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi lainnya.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan kebijakan perencanaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dikarenakan adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain PAD yang sah. Secara umum, arah kebijakan perubahan pendapatan daerah Tahun 2023 adalah:

1. Menetapkan target pajak daerah dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi sampai dengan semester I Tahun 2023.
2. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
3. Meningkatkan kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
4. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
5. Mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
6. Menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang undangan.

4.2. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Perubahan target pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 disusun dengan struktur yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023. Komposisi perubahan pendapatan daerah Tahun 2023 dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Tahun 2022 dan realisasi sampai dengan semester I Tahun 2023 yang dijabarkan sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan target Tahun 2023 sebesar Rp438.341.642.094,00 dengan capaian realisasi sampai dengan semester I sebesar Rp183.641.526.868,00 atau tercapai sebesar 41,89%, sedangkan perubahan target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp478.470.440.628,00 meningkat sebesar Rp40.128.793.534,00 atau 9,15%.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 jenis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pajak Daerah berdasarkan target Tahun 2023 sebesar Rp366.538.458.610,00 dan terealisasi sampai dengan semester I sebesar Rp168.900.208.618,00 atau 46,08%, sedangkan perubahan target pajak daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp392.538.458.610,00 meningkat sebesar Rp26.000.000.000,00 atau 7,09%.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah berdasarkan target pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.896.180.000,00 dan terealisasi sampai dengan semester I sebesar Rp672.445.500,00 atau 17,25%, sedangkan pada perubahan APBD Tahun 2023 target retribusi daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berdasarkan target Tahun 2023 sebesar Rp8.183.285.026,00 dan terealisasi sampai dengan semester I sebesar Rp8.097.676.056,00 atau 98,95%, sedangkan pada perubahan APBD Tahun 2023 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan target pada Tahun 2023 sebesar Rp59.723.718.458,00 dan realisasi sampai dengan semester I sebesar Rp5.971.196.694,00 atau 10,00%, sedangkan perubahan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 diproyeksikan

sebesar Rp73.852.516.992,00 meningkat sebesar Rp14.128.798.534,00 atau 23,66%.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan target Tahun 2023 sebesar Rp1.567.440.205.466,00 dan terealisasi sampai dengan semester I sebesar Rp643.830.113.070,00 atau 41,08%, sedangkan pada perubahan APBD Tahun 2023 pendapatan transfer diproyeksikan mengalami pengurangan sebesar Rp17.459.049.466,00 atau -1,11%.

Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan target Tahun 2023 sebesar Rp1.567.440.205.466,00 dan terealisasi sampai dengan semester I sebesar Rp643.830.113.070,00 atau 41,08% sedangkan pada perubahan APBD Tahun 2023 pendapatan transfer diproyeksikan mengalami pengurangan sebesar Rp17.459.049.466,00 atau -1,11%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum berdasarkan target Tahun 2023 sebesar Rp1.006.215.801.000,00 dan terealisasi sampai dengan semester I sebesar Rp498.192.787.262,00 atau 49,51%, sedangkan pada perubahan APBD Tahun 2023 Dana Alokasi Umum diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil berdasarkan target Tahun 2023 sebesar Rp13.690.048.000,00 dan terealisasi sampai dengan semester I sebesar Rp1.171.684.126,00 atau 8,56%, pada perubahan APBD Tahun 2023 Dana Bagi Hasil diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus berdasarkan target Tahun 2023 sebesar Rp530.075.307.000,00 dan terealisasi sampai dengan semester I sebesar Rp144.465.641.682,00 atau 27,25%, sedangkan pada perubahan APBD Tahun 2023 Dana Alokasi Khusus diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

d. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah berdasarkan target Tahun 2023 sebesar Rp17.459.049.466,00 dan terealisasi sampai dengan semester I sebesar Rp0,00 atau 0,0%, pada perubahan APBD Tahun 2023 Dana Insentif Daerah diproyeksikan mengalami pengurangan sebesar Rp17.459.049.466,00 atau -100,00%.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan target Tahun 2023 sebesar Rp1.092.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan semester I sebesar Rp859.552.880,00 atau 78,71%, sedangkan pada perubahan APBD Tahun 2023 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara total pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.006.873.847.560,00 dan sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp828.331.192.818,00 atau 41,27%, sedangkan pada perubahan APBD Tahun 2023 pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat diproyeksikan menjadi Rp2.029.543.596.628,00 meningkat sebesar Rp22.669.749.068,00 atau 1,13%, sebagaimana tergambar pada Tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1.
Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD 2023	APBD 2023 (Penyesuaian DAU)	APBD 2023 (Pergeseran 6)	Realisasi Semester I APBD 2023	%	Perubahan KUA 2023	Selisih APBD 2023 dengan Perubahan KUA 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	PENDAPATAN DAERAH	2.006.873.847.560,00	2.006.873.847.560,00	2.020.720.695.658,00	828.331.192.818,00	41,27	2.029.543.596.628,00	22.669.749.068,00	1,13%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	438.341.642.094,00	438.341.642.094,00	452.188.490.192,00	183.641.526.868,00	41,89	478.470.440.628,00	40.128.798.534,00	9,15%
	Pajak Daerah	366.538.458.610,00	366.538.458.610,00	366.538.458.610,00	168.900.208.618,00	46,08	392.538.458.610,00	26.000.000.000,00	7,09%
	Retribusi Daerah	3.896.180.000,00	3.896.180.000,00	3.896.180.000,00	672.445.500,00	17,26	3.896.180.000,00	-	0,00%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.183.285.026,00	8.183.285.026,00	8.183.285.026,00	8.097.676.056,00	98,95	8.183.285.026,00	-	0,00%
	Lain-lain PAD Yang Sah	59.723.718.458,00	59.723.718.458,00	73.570.566.556,00	5.971.196.694,00	10,00	73.852.516.992,00	14.128.798.534,00	23,66%
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.567.440.205.466,00	1.567.440.205.466,00	1.567.440.205.466,00	643.830.113.070,00	41,08	1.549.981.156.000,00	-17.459.049.466,00	-1,11%
	Transfer Pemerintah Pusat	1.567.440.205.466,00	1.567.440.205.466,00	1.567.440.205.466,00	643.830.113.070,00	41,08	1.549.981.156.000,00	-17.459.049.466,00	-1,11%
	-Dana Perimbangan	1.549.981.156.000,00	1.549.981.156.000,00	1.549.981.156.000,00	643.830.113.070,00	41,54	1.549.981.156.000,00	-	0,00%
	Dana Transfer Umum	1.019.905.849.000,00	1.019.905.849.000,00	1.019.905.849.000,00	499.364.471.388,00	48,96	1.019.905.849.000,00	-	0,00%
	DBH	13.690.048.000,00	13.690.048.000,00	13.690.048.000,00	1.171.684.126,00	8,56	13.690.048.000,00	-	0,00%
	DAU	1.006.215.801.000,00	1.006.215.801.000,00	1.006.215.801.000,00	498.192.787.262,00	49,51	1.006.215.801.000,00	-	0,00%
	Dana Transfer Khusus	530.075.307.000,00	530.075.307.000,00	530.075.307.000,00	144.465.641.682,00	27,25	530.075.307.000,00	-	0,00%
	DAK Fisik	339.736.586.000,00	339.736.586.000,00	339.736.586.000,00	48.644.661.500,00	14,32	339.736.586.000,00	-	0,00%
	DAK Non Fisik	190.338.721.000,00	190.338.721.000,00	190.338.721.000,00	95.820.980.182,00	50,34	190.338.721.000,00	-	0,00%
	-Dana Insentif Daerah	17.459.049.466,00	17.459.049.466,00	17.459.049.466,00	-	-	-	17.459.049.466,00	-100,00%
	Transfer Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00	859.552.880,00	78,71	1.092.000.000,00	-	0,00%
	Pendapatan Hibah	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00	859.552.880,00	78,71	1.092.000.000,00	-	0,00%
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	300.000,00	100,00	-	-	0,00%
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	347.400.000,00	347.400.000,00	347.400.000,00	-	0,00	347.400.000,00	-	0,00%
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	744.600.000,00	744.600.000,00	744.600.000,00	-	0,00	744.600.000,00	-	0,00%
	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	-	859.252.880,00	100,00	-	-	0,00%

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, (data diolah)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan struktur belanja daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal asset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Perubahan kebijakan perencanaan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 disebabkan:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor: 10.A/LHP/XIX.MAM/05/2023 Tanggal 19 Mei 2023, yang di dalamnya terdapat beberapa kewajiban/utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang harus diselesaikan.

2. Keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, pergeseran antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, dan antar jenis.
3. Mengakomodir perubahan penjabaran APBD yang telah dilaksanakan sebagai akibat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

Berpedoman pada tema pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial”**, maka kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun 2023 lebih diarahkan untuk:

- a. Memenuhi belanja dalam rangka pemenuhan pencapaian prioritas pembangunan daerah.
- b. Memenuhi belanja *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 3) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

- 4) Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana persentase yang dipersyaratkan dalam aturan perundang-undangan.
 - 5) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan sesuai besaran yang dipersyaratkan dalam aturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah.
- c. Belanja Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, yaitu:
- 1) Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 2) Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 - 3) Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - 4) Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Penajaman kegiatan dalam rangka penguatan IPM (Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penurunan angka anak tidak sekolah, pencegahan pernikahan anak) serta penanganan inflasi daerah.
- e. Mengalokasikan anggaran dalam rangka pembayaran kewajiban atas pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD,

Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

5.2. RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Alokasi anggaran belanja daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp2.081.773.891.702,00 yang terealisasi sampai dengan semester I Tahun 2023 sebesar sebesar Rp701.049.766.733,00 atau 33,68%, sedangkan alokasi perubahan belanja daerah Tahun 2023 sebesar Rp2.084.016.272.295,00 bertambah sebesar Rp2.242.380.593,00 atau 0,11% yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi yang semula ditargetkan sebesar Rp1.415.249.385.141,00 yang terealisasi sampai dengan semester I Tahun 2023 sebesar Rp562.783.722.411,00 atau 39,77%, sedangkan alokasi perubahan belanja operasi Tahun 2023 sebesar Rp1.421.877.462.182,00 bertambah sebesar Rp6.628.077.041,00 atau 0,47% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai semula ditargetkan sebesar Rp661.668.733.510,00 yang terealisasi sampai dengan semester I Tahun 2023 sebesar Rp309.902.979.659,00 atau 46,84%, sedangkan alokasi perubahan belanja pegawai Tahun 2023 sebesar Rp634.891.090.765,00 berkurang sebesar Rp26.777.642.745,00 atau -4,05%.
 - b. Belanja Barang dan Jasa yang semula ditargetkan sebesar Rp686.157.139.091,00 yang terealisasi sampai dengan semester I Tahun 2023 sebesar Rp232.302.765.049,00 atau 33,86%, sedangkan alokasi perubahan belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp721.942.858.877,00 bertambah sebesar Rp35.785.719.786,00 atau 5,22%.
 - c. Belanja Bunga yang semula ditargetkan sebesar Rp17.891.952.940,00 yang terealisasi sampai dengan semester I Tahun 2023 sebesar Rp10.104.327.703,00 atau 56,47%, sedangkan alokasi belanja Bunga pada Perubahan APBD Tahun 2023 diproyeksikan tidak mengalami perubahan.
 - d. Belanja Hibah yang semula ditargetkan sebesar Rp44.966.559.600,00 yang terealisasi sampai dengan semester I Tahun 2023 sebesar Rp10.473.650.000,00 atau 23,29%, sedangkan alokasi perubahan

belanja hibah Tahun 2023 sebesar Rp42.856.559.600,00 berkurang sebesar Rp2.110.000.000,00 atau -4,69%.

- e. Belanja Bantuan Sosial ditargetkan sebesar Rp4.565.000.000,00 realisasi sampai dengan semester I Tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%, sedangkan alokasi perubahan belanja bantuan sosial Tahun 2023 sebesar Rp4.295.000.000,00 berkurang sebesar Rp270.000.000,00 atau -5,91%.
- 2. Belanja Modal yang semula ditargetkan sebesar Rp433.285.810.931,00 yang terealisasi sampai dengan semester I Tahun 2023 sebesar Rp37.015.255.906,00 atau 8,54%, sedangkan alokasi perubahan belanja modal Tahun 2023 sebesar Rp442.766.164.076,00 bertambah sebesar Rp9.480.535.145,00 atau 2,19%.
- 3. Belanja Tidak Terduga yang semula ditargetkan sebesar Rp15.087.642.656,00 yang terealisasi sampai dengan semester I Tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%, sedangkan alokasi perubahan belanja tidak terduga Tahun 2023 sebesar Rp9.261.492.055,00 berkurang sebesar Rp5.826.150.601,00 atau -38,62%.
- 4. Belanja Transfer yang semula ditargetkan sebesar Rp218.151.052.974,00 yang terealisasi sampai dengan semester I Tahun 2023 sebesar Rp101.250.788.416,00 atau 46,41%, sedangkan alokasi perubahan belanja Transfer Tahun 2023 sebesar Rp210.111.153.982,00 berkurang sebesar Rp8.039.898.992,00 atau -3,69% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Bagi Hasil semula ditargetkan sebesar Rp204.566.027.974,00 terealisasi sampai dengan semester I Tahun 2023 sebesar Rp100.963.288.416,00 atau 49,35%, sedangkan alokasi perubahan belanja Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp197.176.128.982,00 berkurang sebesar Rp7.389.898.992,00 atau -3,61%.
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp13.585.025.000,00 terealisasi sampai dengan semester I Tahun 2023 sebesar Rp287.500.000,00 atau 2,12%, sedangkan alokasi perubahan belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp12.935.025.000,00 berkurang sebesar Rp650.000.000,00 atau -4,78%.

Adapun target belanja daerah Tahun 2023 dan realisasi belanja daerah sampai dengan semester I Tahun 2023 dan serta rencana perubahan belanja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.1.
Target Belanja Daerah Tahun 2023 dan
Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD 2023	APBD 2023 (Penyesuaian DAU)	APBD 2023 (Pergeseran 6)	Realisasi Semester I APBD 2023	%	Perubahan KUA 2023	Selisih APBD 2023 dengan Perubahan KUA 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)
II	BELANJA DAERAH	2.081.773.891.702,00	2.081.773.891.702,00	2.095.620.739.800,00	701.049.766.733,00	33,68	2.084.016.272.295,00	2.242.380.593,00	0,11%
1	BELANJA OPERASI	1.415.249.385.141,00	1.404.308.355.441,00	1.413.662.197.726,00	562.783.722.411,00	39,77	1.421.877.462.182,00	6.628.077.041,00	0,47%
	Belanja Pegawai	661.668.733.510,00	635.059.090.765,00	635.059.090.765,00	309.902.979.659,00	46,84	634.891.090.765,00	-26.777.642.745,00	-4,05%
	Belanja Barang dan Jasa	686.157.139.091,00	701.825.752.136,00	711.179.594.421,00	232.302.765.049,00	33,86	721.942.858.877,00	35.785.719.786,00	5,22%
	Belanja Bunga	17.891.952.940,00	17.891.952.940,00	17.891.952.940,00	10.104.327.703,00	56,47	17.891.952.940,00	-	0,00%
	Belanja Hibah	44.966.559.600,00	44.966.559.600,00	44.966.559.600,00	10.473.650.000,00	23,29	42.856.559.600,00	-2.110.000.000,00	-4,69%
	Belanja Bantuan Sosial	4.565.000.000,00	4.565.000.000,00	4.565.000.000,00	-	0,00	4.295.000.000,00	-270.000.000,00	-5,91%
2	BELANJA MODAL	433.285.810.931,00	459.852.488.837,00	464.345.494.650,00	37.015.255.906,00	8,54	442.766.164.076,00	9.480.353.145,00	2,19%
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.087.642.656,00	15.087.642.656,00	15.087.642.656,00	-	-	9.261.492.055,00	-5.826.150.601,00	-38,62%
4	BELANJA TRANSFER	218.151.052.974,00	202.525.404.768,00	202.525.404.768,00	101.250.788.416,00	46,41	210.111.153.982,00	-8.039.898.992,00	-3,69%
	Belanja Bagi Hasil	204.566.027.974,00	188.940.379.768,00	188.940.379.768,00	100.963.288.416,00	49,35	197.176.128.982,00	-7.389.898.992,00	-3,61%
	Belanja Bantuan Keuangan	13.585.025.000,00	13.585.025.000,00	13.585.025.000,00	287.500.000,00	2,12	12.935.025.000,00	-650.000.000,00	-4,78%

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (data diolah)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam penyusunan APBD di Provinsi Sulawesi Barat. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perhitungan yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja. Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, sumber dari sisi Penerimaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan pinjaman daerah sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok hutang dan penyertaan modal.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan dilakukan berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 10.A/LHP/XIX.MAM/05/2023 Tanggal 19 Mei 2023 perihal laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang semula diproyeksikan sebesar Rp137.454.471.371,00 yang hanya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp137.454.471.371,00. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran

2022, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp116.924.453.298,83, sehingga Penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD 2023 diproyeksikan menjadi Rp116.924.453.299,00 berkurang Rp20.530.018.072,00 atau -14,94% yang hanya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp116.924.453.299,00.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp62.554.427.229,00 yang hanya diperuntukan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp62.554.427.229,00 sampai dengan semester I Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp15.416.600.309,00 atau 24,65%. Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2023 diproyeksikan menjadi Rp62.451.777.632,00 berkurang Rp102.649.597,00 atau -0,002%.

Adapun besaran dan realisasi pembiayaan daerah daerah Tahun 2023 sampai dengan semester I serta rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel VI.1.
Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD 2023	APBD 2023 (Penyesuaian DAU)	APBD 2023 (Pergeseran 6)	Realisasi Semester I APBD 2023	%	Perubahan KUA 2023	Selisih APBD 2023 dengan Perubahan KUA 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SURPLUS/DEFISIT	-74.900.044.142,00	-74.900.044.142,00	-74.900.044.142,00	127.281.426.085,00	-169,94	-54.472.675.667,00	20.427.368.475,00	-27,27%
III	PEMBIAYAAN DAERAH	74.900.044.142,00	74.900.044.142,00	74.900.044.142,00	-15.416.600.309,00	-20,58	54.472.675.667,00	-20.427.368.475,00	-27,27%
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	137.454.471.371,00	137.454.471.371,00	137.454.471.371,00	-	-	116.924.453.299,00	-20.530.018.072,00	-14,94%
	SILPA	137.454.471.371,00	137.454.471.371,00	137.454.471.371,00	-	-	116.924.453.299,00	-20.530.018.072,00	-14,94%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	62.554.427.229,00	62.554.427.229,00	62.554.427.229,00	15.416.600.309,00	24,65	62.451.777.632,00	- 102.649.597,00	- 0,002
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	62.554.427.229,00	62.554.427.229,00	62.554.427.229,00	15.416.600.309,00	24,65	62.451.777.632,00	- 102.649.597,00	- 0,002
	PEMBIAYAAN NETTO	74.900.044.142,00	74.900.044.142,00	74.900.044.142,00	-15.416.600.309,00	-20,58	54.472.675.667,00	-20.427.368.475,00	-27,27%
	SILPA	-	-	-	111.864.825.776,00		-	-	-

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (data diolah)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah, arah kebijakan perubahan belanja daerah dan arah kebijakan perubahan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan perubahan APBD 2023.

Secara umum, penganggaran pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan.
2. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak kendaraan.
3. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah serta pemutakhiran data objek pajak.
4. Pemberian insentif pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan mutasi untuk BBNKB II dari non-DC ke DC yang menjadi potensi penerimaan PKB untuk tahun berikutnya.
5. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, gerai Samsat, Samsat Keliling, pengembangan Samsat *Payment Point* dan beberapa inovasi lainnya.
6. Mendorong sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan.
7. Optimalisasi penggunaan aset milik daerah untuk peningkatan pendapatan daerah.
8. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berkinerja maksimal.
9. Optimalisasi pengelolaan BLUD RSUD.
10. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah.

Selain pendapatan, sisi pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja hibah dan bantuan

sosial, belanja di bidang pendidikan, belanja di bidang kesehatan dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan pengalokasian belanja memunculkan ketidakefisienan kinerja pemerintah. Ketidakefisienan kinerja pemerintah dikarenakan kurang transparan, kurang benar, kurang cepat dan kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas. Hal ini akan membuka kemungkinan terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan negatif lainnya. Untuk itu strategi belanja daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah tidak dialokasikan secara *overspending* (belanja yang melebihi kebutuhan/pemborosan);
- 2) Belanja daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kelancaran jalannya pemerintahan serta menghindari *misspending* (belanja yang tidak sesuai kebutuhan);
- 3) Perencanaan Belanja hanya dipastikan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga menghindari *underspending* (belanja yang tidak terlaksana);
- 4) Belanja daerah harus memperhatikan aspek hukum untuk menghindari *fraud spending* (belanja yang melanggar ketentuan hukum);
- 5) Meningkatkan transparansi belanja, ketidakefisienan kinerja pemerintah dikarenakan kurang transparan, kurang benar, kurang cepat dan kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas. Hal ini akan membuka kemungkinan terjadinya penyelewengan, penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan negatif lainnya.

Selain hal tersebut di atas, pemerintah daerah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya. Salah satu kata kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas publik. Karena untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang mendasarkan konsep *Value For Money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performance budget*). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.

Mamuju, 25 September 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT



Dr. Hj. SITI SURAIDAH SUHARDI, SE, M.Si

Ketua

USMAN SUHURIAH

Wakil Ketua

H. ABDUL HALIM

Wakil Ketua

H. ABDUL RAHIM, S.Ag, MH

Wakil Ketua